BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis yang ketat dalam era globalisasi memaksa perusahaan harus bertahan dalam berkompetisi yang salah satunya melalui agresivitas pajak. Tindakan agresivitas pajak adalah kegiatan untuk meminimalisir laba kena pajak perusahaan melewati perencanaan pajak baik itu legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Frank, dkk., 2009). Salah satu cara untuk mengukur sebuah tindakan agresivitas pajak adalah memakai pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR yang dimanfaatkan dengan cara membandingkan total kas pajak yang dibayar perusahaan dengan total laba sebelum pajak (Hanlon & Heitzmen, 2010). Pada penelitian ini pengukuran agresivitas pajak diukur dengan CETR untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar pajaknya, apakah sudah membayar sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 25% sehingga apabila perusahaan menekan beban pajaknya dibawah tarif yang ada maka dapat dikatakan perusahaan tersebut agresif terhadap pajaknya, selain itu di Indonesia juga hanya mengenal istilah beban pajak. Tindakan agresivitas pajak dikatakan sebagai tindakan legal dalam permasalahan penghindaran pajak. Akan tetapi, perusahaan yang semakin mencari celah-celah untuk menghindari pajak tersebut, maka dapat dikatakan semakin cekatan terhadap pajak. Jadi dapat ditegaskan bahwa tindakan agresivitas pajak merupakan tindakan yang sesuai aturan dalam sebuah upaya penghindaran pajak.

Pada penelitian sebelumnya, disebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Pada penelitian Chen dkk. (2010) perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang memegang kendali perusahaan dengan mengisi posisi penting perusahaan seperti direktur utama, manajer, dan pemegang saham. Dalam teori keagenan, konflik pada perusahaan keluarga terjadi diantara pemilik saham terbesar atau mayoritas dengan pemilik saham terkecil atau

minoritas. Konflik terjadi karena kesenjangan jabatan, keuntungan yang diperoleh serta peluang untuk melakukan agresivitas pajak dan menjalankan transaksi dengan pihak berelasi (Chen dkk., 2010). Menurut Chen dkk. (2010), tindakan agresif pajak dalam perusahaan keluarga lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan non keluarga. Perusahaan keluarga bersedia membayar pajak yang tinggi demi reputasi ketimbang harus menanggung beban atas tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan milik keluarga enggan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan Chen dkk. (2010) memakai objek perusahaan yang berada di Amerika, lain hal dengan perusahaan di Indonesia. Riset oleh Praptidewi dan Sukartha (2016) menunjukkan sebaliknya bahwa perusahaan milik keluarga cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak yang tinggi. Ini didukung dengan penelitian oleh Sari (2010), Sirait dan Martani (2014) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga besar akan melakukan aktivitas agresivitas pajak yang tinggi karena dapat menurunkan beban pajak tersebut dan sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan yang lain dan lebih menguntungkan. Perusahaan menilai agresivitas pajak yang dilakukan memiliki resiko yang lebih kecil daripada manfaat atas penghematan pajak tersebut yaitu perluasan bisnis yang menguntungkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 18 ayat 4 mengharuskan hubungan istimewa dianggap ada asalkan pelibatan modal baik langsung maupun tidak langsung antara wajib pajak atau lebih paling sedikit 25%, wajib pajak mendominasi wajib pajak lain atau lebih secara langsung maupun tidak langsung, dan terdapat ikatan famili segaris/semenda atau ke samping satu derajat. Pemerintah menanggapi serius dengan adanya transaksi hubungan istimewa dikarenakan sebagai salah satu siasat dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Pemerintah berupaya mencegah agresivitas pajak melalui transaksi hubungan istimewa. Menurut UU Perpajakan tahun 1994 Pasal 18, dikatakan bahwa petugas pajak memiliki hak untuk memperbaiki transaksi tidak wajar dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya transaksi

hubungan istimewa tidak mendukung tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan, karena petugas pajak dapat melakukan perbaikan terhadap transaksi tidak wajar (Chandraningrum, 2014). Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang dibuat karena perusahaan melakukan agresivitas pajak melalui kegiatan *transfer pricing* yaitu transaksi yang tidak sesuai dengan harga wajar yang ada dan akan menekan kewajiban pajak yang ditanggung. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang transaksi hubungan istimewa yaitu dengan mengurangi beban pajak dapat dikatakan perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajaknya.

Aspek lain yang dapat mendukung kegiatan agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan pengukuran besar dari dampak adanya kreditur untuk membiayai aset perusahaan (Anita, 2015). Tingginya hutang menyebabkan upaya agresivitas pajak perusahaan rendah. Hal ini dikarenakan, perusahaan memberikan perhatian besar terhadap laporan keuangannya untuk menjaga pinjaman tersebut dapat dibayar dengan baik daripada melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi hutang, maka Perusahaan yang menggunakan pinjaman untuk pembiayaan operasionalnya memiliki beban bunga atas pinjaman tersebut (Jessica dan Toly, 2014). Menurut UU Nomor 36 tahun 2008, beban bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan sebagai *deductible expense* ketika perusahaan melakukan perhitungan PPh badan. Ini berarti bahwa perusahaan memperoleh keringanan pajak atas beban bunga yang tinggi akibat pinjaman yang dilakukan. Dengan semakin tinggi pinjaman tersebut, maka beban pajak akan berkurang yang menandakan perusahaan semakin agresif terhadap pajaknya.

Penelitian terdahulu terkait dengan kepemilikan keluarga dilakukan oleh Chen dkk. (2010) menghasilkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Chen dkk. (2010) memakai sampel perusahaan di Amerika lain hal dengan penelitian oleh Praptidewi dan Sukartha (2016) yang

memakai sampel perusahaan di Indonesia yang menunjukkan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian mengenai transaksi hubungan istimewa oleh Juliawati (2019) menghasilkan transaksi hubungan istimewa tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif perseroan yang berarti tidak terkait dengan agresivitas pajak, sedangkan penelitian oleh Azizah dan Kusmuriyanto (2016) menghasilkan transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tentang *leverage* oleh Kurniasih dan Sari (2013) menghasilkan *leverage* tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Rachmithasari (2015) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Penelitian ini dilakukan karena termotivasi dari penelitian sebelumnya yang belum menunjukkan kekonsistenan mengenai kepemilikan keluarga, transaksi hubungan istimewa, *leverage*, dan agresivitas pajak. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Alasan memilih perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI dikarenakan perusahaan tersebut berskala besar dan sudah *go public* sehingga informasi yang diberikan kepada publik merupakan informasi yang akurat dan sudah diaudit. Serta periode 2016-2018 dianggap masih relevan untuk menggambarkan situasi ekonomi saat ini. Dengan dasar masalah yang ada maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Transaksi Hubungan Istimewa, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah dalam pertanyaan berikut:

- a. Apakah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak perusahaan?
- b. Apakah transaksi hubungan istimewa memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

- c. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh kepemilikan keluarga, terhadap agresivitas pajak.
- b. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap agresivitas pajak.
- c. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini harapannya dapat dijadikan dasar untuk penelitian berikutnya. Diharapkan penelitian ini menambah wawasan mengenai kepemilikan keluarga, transaksi hubungan istimewa, dan *leverage*.

- b. Manfaat Praktis

Hasilnya diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan terutama bagi pembuat kebijakan strategis dalam hal agresivitas pajak serta bagi Pemerintah dalam mengamati agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi dari penelitian ini dengan baik, maka sistematika penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab 1 memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 memuat tentang mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab 3 memuat tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 memuat tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab 5 memuat tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.